

BAB III

PEMERINTAHAN KOLONIAL DI PADANG ABAD XVII-XVIII M BERDASARKAN NASKAH *OENDANG-OENDANG ADAT LIMBAGO*

A. Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*

Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* berdasarkan ditulis oleh Sutan Gagar Alam pada tahun 1856 di wilayah Sumatera Barat. Ditulis menggunakan aksara Arab (Jawi) dalam bahasa Melayu-Minangkabau, naskah ini termasuk dalam koleksi naskah yang dikenal dengan kode Or. 12.182, dengan judul koleksi “*Collective Volume with Texts in Malay, Minangkabau, Arabic Script*” dengan subjudul “*Oendang-oendang Adat Limbago: Tambo Minangkabau; and Other Texts*”, dan kini disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Naskah ini terdiri dari 288 halaman, dan telah dipindai dalam 151 berkas digital (*scans*) yang seluruhnya dapat diakses bebas oleh publik melalui situs resmi Leiden University Libraries. Dapat diunduh melalui semua alat pencari internet pada situsnya <https://digitalcollections.universiteitleiden.nl>.

Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* ini merupakan naskah yang di koleksi oleh Ronkel, ia merupakan seorang kurator naskah yang pernah ada di *Bataviaasch Genootschap* (sekarang: Museum Nasional dan Perpustakaan Nasional). Adapun Informasi mengenai media tulis yang digunakan, seperti

jenis kertas maupun tinta, tidak disebutkan secara eksplisit dalam katalog digital Universitas Leiden. Untuk memudahkan pemahaman isi naskah, telah dilakukan alih aksara (transliterasi) oleh Yulfira Riza, yang hasilnya telah dibukukan dan kini disimpan di Museum Adityawarman, Padang, Sumatera Barat.

Masyarakat Minangkabau dikenal luas dengan tradisi lisan “*kaba babarito*”, yaitu penyampaian pesan secara turun-temurun dari mulut ke mulut. Namun, hal ini tidak berarti budaya tulis di Minangkabau sama sekali tidak berkembang. Di berbagai wilayah Minangkabau dapat dijumpai peninggalan berupa naskah dan catatan tertulis. Aksara lokal yang digunakan masyarakat Minangkabau merupakan hasil adaptasi dari aksara Arab, yang dikenal sebagai aksara Arab-Melayu, aksara Jawi, atau Arab gundul. Penggunaan aksara Arab-Melayu melahirkan berbagai teks naskah yang merekam nilai-nilai kehidupan masyarakat Minangkabau pada masanya⁸³.

Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* (OOAL) merupakan dokumen yang memuat informasi penting mengenai sejarah, struktur sosial, aturan dan hukum, serta persebaran golongan bangsawan dalam masyarakat tradisional Minangkabau yang pada masa lampau lebih sering disebut dengan istilah *Minangcabo* atau *Minangkabo*. Kandungan isi naskah ini mencakup

⁸³ Yona Primadesi, Profil Pelestarian Naskah Kuno Minangkabau, Sumatera Barat, *Jurnal Palimpsest Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 4(1), 2012, hal. 4–5.

peristiwa-peristiwa yang berlangsung dalam rentang waktu sebelum tahun 1621 hingga 1856 Masehi⁸⁴. Lebih lanjut naskah ini juga memuat cerita mengenai asal usul negeri Minangkabau yaitu daripada anak Nabi Adam yang bernama Iskandar Zulkarnain⁸⁵. Adapun pembahasan mengenai asal usul negeri Minangkabau ini, sejatinya merupakan pembahasan yang sangat umum dibahas dalam setiap naskah tambo. Sebelumnya penulis pernah melakukan transliterasi naskah tambo Minangkabau, dan isinya membahas hal serupa, selain itu dalam penelitian lain, peneliti juga pernah melakukan alih aksara pada naskah tambo Surau Parak Laweh Pariangan dan menceritakan cerita yang sama dengan narasi yang tak jauh berbeda.

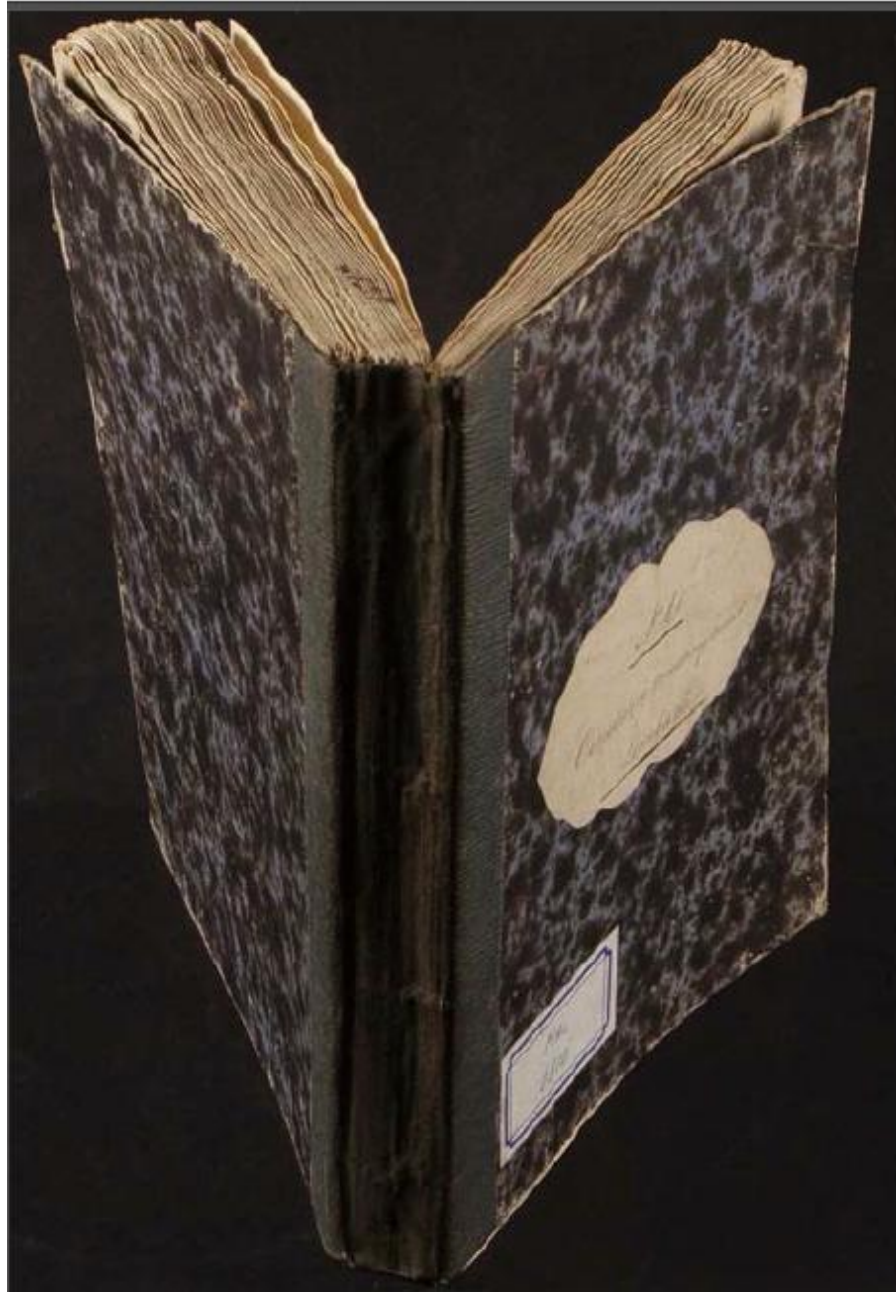
Naskah ini juga memuat nasehat-nasehat adat yang disampaikan oleh Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah nan Sabatang tentang pentingnya saling menyayangi, menghindari konflik yang bersumber dari bisikan dan hasutan, menjaga lisan dan lapang dada. Oleh sebab itu naskah ini mengatur oendang-oendang yang berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut di dalam naskah ini juga terdapat pembahasan mengenai kedatangan Belanda dan perkembangan kepemimpinannya di Minangkabau⁸⁶ yang kemudian pembahasan tersebut menjadi pembahasan relevan terkait penelitian ini.

⁸⁴ Alfa Noranda, “Transliterasi Undang-Undang Adat Limbago”, *manangkirang.org*, <https://manangkirang.org/project/transliterasi-undang-undang-adat-limbago/>, diakses 16 Juni 2025.

⁸⁵ Yulfira Riza, *op.cit.*, hal. 3-4.

⁸⁶ *Ibid*, hal. 4.

Gambar 3. 1 Cover Naskah Oendang-oendang Adat Limbago

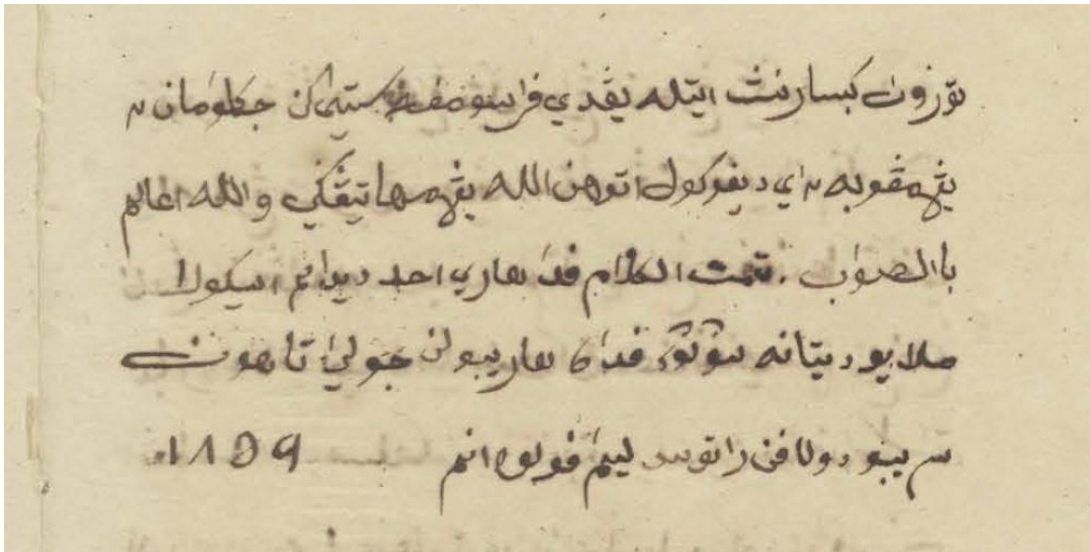


Sumber: Digital Collection Leiden University Libraries
https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2314591?solr_nav%5Bid%5D=f2d74f2ccfb2c64a3f0f&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0#page/1/mode/1up

Tambo Minangkabau ini, satu di antara Tambo Alam sekaligus Tambo Adat. Sebagai Tambo Alam Minangkabau, menceritakan pertumbuhan dan perkembangan Limbago Adat Penghulu dan Limbago Adat Rajo sebagai pucuk adat di Minangkabau. Sebagai Tambo Adat, merupakan “*barih balabeh*” (memberi garis aturan adat dan menandai batasan norma hukum adat) bersumber undang-undang adat Minangkabau. Hukum adat didalamnya meliputi tiga hukum yang dipakai di Minangkabau dirumuskan dalam integritas 3 hukum yakni “*Tigo Tali Sapilin*” (tiga hukum terintegrasi). Tiga hukum itu adalah: (1) Tali (Hukum) Syara’ “Dasar: *Anggo Tanggo*”, (2) Tali (Hukum) Adat “Hukum: *Raso Pareso*” dan (3) Tali (Hukum) akal semua Regulasi/ Hukum Negara “*Baundang: Alua Patuik*”. Sedangkan Undang-Undang Adat Limbago di dalamnya sebagai sumber norma hukum adat Minangkabau, meski tidak tersusun, namun dapat dirumuskan sistem hukum adat “Limbago Nan-10”. Limbago Nan-10 itu: 2 cupak (cupak asli/ usali dan cupak buatan), 4 Undang-Undang yakni: Undang Luak dan Rantau, Undang (Berdiri) Nagari, Undang Dalam (Hubungan Sosial) Nagari, Undang Nan-20 terdiri dari Undang Nan 12 dan Undang Nan 8 menyangkut kriminal⁸⁷.

⁸⁷ Yulizal Yunus, *Undang-undang Adat Limbago Minangkabau (Tela'ah Naskah Hasil Alih Aksara)*, (Padang: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan, UPTD Museum Adityawarman, 2024).

Gambar 3. 2 Kolofon Naskah *Oendang-oendang Adat Limbago*



Sumber: Digital Collection Leiden University Libraries

https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2314591?solr_nav%5Bid%5D=f2d74f2ccfb2c64a3f0f&solr_nav%5Bpage%5D=0&solr_nav%5Boffset%5D=0#page/1/mode/1up

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari kolofon naskah diatas dapat diketahui bahwasannya naskah ini selesai ditulis pada tahun 1856 di Solok. Pada kolofon naskah tertulis sebagai berikut: *"Tamat al-kalam pada 6 hari Ahad di dalam sekolah Melayu di tanah Solok pada hari bulan Juli tahun seribu delapan ratus lima puluh enam 1856"*.

B. Latar Belakang Kehadiran Kolonial di Padang

Pada tahun 1453, Turki berhasil menaklukkan Konstantinopel, kota dagang Eropa terakhir yang paling penting. Penaklukan ini disertai dengan penutupan rute perdagangan antara Eropa dan Asia, yang merupakan jalur utama antara kedua wilayah tersebut. Akibatnya, perdagangan Eropa, yang

menjadi tulang punggung ekonomi mereka, terhenti. Hal ini memaksa negara-negara Eropa untuk mencari cara baru untuk melanjutkan perdagangan, karena rute terdekat kini berada di bawah kendali Turki. Mereka mulai menjelajahi samudera. Mulai abad ke-15, negara-negara Eropa semakin aktif dalam menjelajahi Samudera, hingga mencapai Asia dan Afrika. Namun, niat awal mereka untuk berdagang berubah menjadi ambisi untuk menguasai wilayah yang mereka temukan, menandai awal kolonialisme Eropa di Asia dan Afrika⁸⁸.

Pada akhir abad ke-16 Belanda turut memulai penjelajahan samudera yang kemudian menjadi fondasi awal kolonialisme di Nusantara. Hal ini didorong oleh keinginan mereka menguasai jalur perdagangan rempah yang sangat bernilai di pasar internasional terkhusus pasar Eropa kala itu. Belanda melalui kongsi dagangnya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) mengambil peranan penting dalam mengembangkan pengaruhnya di wilayah Nusantara⁸⁹.

VOC atau Perusahaan Hindia Timur Belanda didirikan pada 20 Maret 1602 sebagai kongsi dagang oleh pemerintah Belanda untuk memonopoli perdagangan di kawasan Hindia-Timur. VOC merupakan perusahaan multinasional pertama di dunia yang memiliki kewenangan sangat luas, termasuk mencetak uang, membuat perjanjian, membentuk angkatan

⁸⁸ Rosmaniada Sinaga, dkk., *Penjelajahan Samudera Orang Portugis*, *Ar-Rumman-Journal of Education and Learning Evolution*, 1(2), 2024, hal. 335-345.

⁸⁹ Muhammad Diki Chandra, dkk., *Penjelajahan Samudera Bangsa Belanda yang Berujung Penjajahan Tanah Nusantara*, *JAHE-Jurnal Akutansi Hukum dan Edukasi*, 1(2), 2024, hal. 745-754.

bersenjata, bahkan berperang dan mendirikan pemerintahan sendiri di wilayah-wilayah kekuasaannya. Dengan dukungan modal besar dan teknologi maritim yang maju, VOC mampu mengalahkan pesaing-pesaingnya seperti Portugis dan Inggris di kawasan Asia Tenggara. Di Nusantara, VOC mulai memperkuat pengaruhnya melalui perjanjian dagang, politik adu domba, dan kekuatan militer⁹⁰. Oleh karenanya sampai hari dapat kita saksikan berbagai benteng peninggalan VOC di Indonesia.

Pada masa kekuasaan VOC di Nusantara, Maluku, Jawa, dan Sumatra, adalah pusat rempah dunia. Maluku terkenal dengan cengkih dan pala, sedangkan pulau Jawa serta pesisir Sumatra menjelma sebagai sumber utama lada⁹¹. Oleh karenanya, sejak awal abad ke-17, Belanda melalui serikat dagangnya VOC, telah berupaya untuk memulai hubungan dengan wilayah Pantai Barat Sumatera, namun senantiasa mengalami kegagalan dikarenakan kuatnya posisi dan hegemoni Aceh di wilayah tersebut. Sehingga, agar tetap bisa memasuki wilayah Pantai Barat untuk berniaga, maka kompeni Belanda ini harus membayar pajak kepada Kesultanan Aceh⁹². Namun, pasca wafatnya Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh, kejayaan Aceh meredup⁹³. Hal ini

⁹⁰ Rosmaida Sinaga, dkk. *loc.cit.*

⁹¹ Government of Western Australia, "*VOC (United Dutch East India Company)*," *Western Australian Museum*, <https://museum.wa.gov.au/explore/dirk-hartog/voc-united-dutch-east-india-company#:~:text=Spices%20had%20to%20be%20sourced,trade%20already%20had%20a%20history>, diakses 20 Maret 2025.

⁹² A.A Navis, *op.cit.*, hal. 22-23.

⁹³ M. Yahya Harun, *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI-XVII*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995), hal. 16.

menyebabkan terbuka kesempatan bagi armada VOC untuk berdagang dengan cukup leluasa di Pantai Barat.

Keleluasaan Belanda ini tidak berlangsung lama, karena Aceh berupaya kembali menegaskan klaimnya atas wilayah kekuasaannya di sepanjang pantai barat Sumatera. Akhirnya terjadilah perdamaian dengan syarat Belanda harus mengganti kerugian perang kepada Aceh, dan Aceh mengizinkan Belanda membuka kantor dagang di Padang⁹⁴. Dalam literatur lain disebutkan, bahwa Sultan Aceh bahkan memberi *hadiah* lada dalam jumlah besar kepada pejabat VOC: “*De Sultane gaf een belangrijk geschenk in peper, tachtig baren voor Gouverneur-Generaal Maetsuycker, vijftwintig voor Bon, tien voor Van Groenewegen*”. Artinya, “Sultane memberikan hadiah penting berupa lada, delapan puluh batang untuk Gubernur Jenderal Maetsuycker, dua puluh lima untuk Bon, dan sepuluh untuk Van Groenewegen.” Hadiah tersebut merupakan sinyal bahwa Aceh mendukung kontrak dagang dengan Belanda. Pada awal 1661, VOC pun menerjunkan Jan van Groenewegen ke Padang sebagai pemimpin tinggal (*opperkoopman*) dan segera membangun *loge/* loji (kantor dagang sementara)⁹⁵.

Berdasarkan analisis penulis terhadap *Oendang-oendang Adat Limbago*, kedatangan Belanda ke Padang pada abad XVII bukan semata-mata

⁹⁴ A.A Navis, *loc.cit.*

⁹⁵ Willem Johan Adriaan de Leeuw, *Het Painansch Contract: Academisch Proefschrift ter verkrijging van den graad van doctor* (Amsterdam: H. J. Paris, 1926), hal. 15.

ekspansi sepihak, melainkan juga terjadi atas persetujuan dan undangan dari elite lokal. Naskah mencatat bahwa VOC memperoleh izin untuk mendirikan kantor dagang melalui diplomasi dan pemberian hadiah kepada penguasa setempat, yang menegaskan adanya negosiasi aktif antara Belanda dan masyarakat lokal. Penulis menilai bahwa catatan ini menekankan peran masyarakat Minangkabau dan Aceh dalam mengelola interaksi dengan kekuatan asing, sehingga kedatangan kolonial tidak dapat dilihat hanya sebagai tindakan dominasi sepihak oleh Belanda.

Pendekatan ini juga menunjukkan bagaimana kedatangan VOC menjadi fondasi awal pembentukan administrasi kolonial di Padang, yang menyesuaikan diri dengan struktur sosial dan politik lokal. Interaksi antara Belanda dan masyarakat Minangkabau pada tahap awal bersifat kompromi dan adaptif, memungkinkan VOC mempertahankan keberadaannya secara relatif stabil. Dengan demikian, penulis menekankan bahwa memahami kedatangan kolonial melalui perspektif lokal penting untuk merekonstruksi dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi pada abad XVII–XVIII di Padang.

VOC memilih Padang sebagai pangkalan utama karena posisi strategisnya. Catatan VOC tahun 1661 menyebut secara gamblang: *“Padang werd tot hoofd-kantoor bestemd wegens zijn centrale ligging, goede reede en gezonde atmosfeer”*, yang berarti Padang ditetapkan sebagai kantor utama karena posisi sentralnya, teluk jangkar yang baik, dan iklim sehat. Pada Februari 1664, VOC resmi membangun loji permanen di Padang atas izin

Sultan Aceh. Dengan berdirinya loji ini, pada 1666 VOC menjadikan Padang sebagai pusat administrasi wilayah Pantai Barat Sumatra⁹⁶. Inilah yang mendorong kapal-kapal dagang VOC rutin singgah di Bandar Padang untuk memuat lada.

C. Kondisi Politik Tradisional Minangkabau

Masyarakat Minangkabau pra-kolonial membangun sistem politiknya atas dasar filosofi "*Alam Takambang Jadi Guru*" (alam berkembang jadi guru)⁹⁷. Prinsip ini melahirkan tata kelola unik yang memadukan matrilinealitas, demokrasi musyawarah, dan otonomi komunitas. Dalam tradisi masyarakat adat Minangkabau, proses terbentuknya sebuah nagari telah lama diatur melalui ungkapan adat yang dikenal luas, yakni: "*Dari taratak menjadi dusun, dari dusun menjadi koto, dari koto menjadi nagari, nagari ba panghulu*". Pepatah ini mencerminkan tahapan pertumbuhan permukiman yang secara bertahap mengalami perkembangan dimana, pemerintahan lokal dimulai dari unit terkecil bernama taratak, yang kemudian berkembang menjadi dusun, berlanjut menjadi koto, hingga akhirnya mencapai

⁹⁶ *Ibid*, hal. 65.

⁹⁷ Taufik Abdullah, *Adat and Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau*, *Cornell University Southeast Asia Program*, Vol. 2, 1996, hal. 7.

bentuk penuh sebagai nagari. Suatu nagari umumnya dianggap sah apabila telah dihuni oleh minimal empat suku yang menetap di wilayah tersebut⁹⁸.

Sejak kerajaan Pagaruyung didirikan (abad ke-14), sistem nagari berkembang sebagai *village republic* (desa republik) karena otonomi tinggi warganya⁹⁹. Tercatat Pagaruyung membawahi lebih dari 500 nagari yang masing-masing merupakan satuan wilayah otonom dengan kekayaan sendiri dan pengadilan adat sendiri. Pemerintahan nagari bertumpu pada tiga pilar, yaitu Penghulu (*niniak mamak*) sebagai pemimpin suku yang dipilih melalui musyawarah, ‘Alim Ulama sebagai penjaga syariat Islam, dan Cadiak Pandai sebagai ahli strategi antarnagari¹⁰⁰. Kekhasan sistem ini juga terletak pada peran sentral *Bundo Kanduang* yang mengontrol tanah ulayat matrilineal. Pembagian otoritas ini menunjukkan keseimbangan unik antara administrasi politik laki-laki dan kendali ekonomi perempuan di Minangkabau.

Keseimbangan antara adat dan syarak tersebut berakar dari falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” (ABS-SBK) yang telah lama menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau. Nilai ini menegaskan bahwa adat tidak berdiri sendiri, melainkan berlandaskan ajaran

⁹⁸ Ahmad Dt. Batuah, A. Dt. Manjoindo, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1956), hal. 42.

⁹⁹ Hilaire Tegan, *Legal Pluralism and Land Administration in West Sumatra: The Implementation of Local and Nagari Governments’ Regulations on Communal Land Tenure*, *BRICS Initiatives for Critical Agrarian Studies (BICAS)*, 2015, hal. 1-11.

¹⁰⁰ P. E. de Josselin de Jong, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1960), hal. 73.

Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Hafizah, dkk. menjelaskan bahwa implementasi ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat Minangkabau tampak pada proses musyawarah, penegakan hukum, serta mekanisme penyelesaian konflik, di mana norma adat dan prinsip syarak senantiasa berjalan seiring¹⁰¹. Dengan demikian, struktur politik tradisional Minangkabau tidak hanya berbasis pada kekerabatan matrilineal dan musyawarah mufakat, tetapi juga menyerap nilai-nilai Islam sebagai legitimasi moral dan spiritual.

Adapun kondisi politik tradisional Padang pada abad ke-17 hingga ke-18 memperlihatkan struktur kekuasaan yang cukup terbuka dan rentan terhadap pengaruh eksternal. Sebagai pelabuhan penting di pesisir barat Sumatra, Padang telah menjadi simpul interaksi antara pemimpin adat Minangkabau dari pedalaman, pedagang pesisir, serta kekuatan asing seperti Kesultanan Aceh dan Belanda melalui kongsi dagang VOC. Dalam konteks ini, struktur kekuasaan Padang tidak berdiri sendiri sebagai nagari otonom semata, melainkan sebagai entitas politik yang melibatkan jaringan suku, kaum, dan tokoh adat yang berperan aktif dalam diplomasi dan pengambilan keputusan.

Pada dasarnya, sistem politik Minangkabau berbasis pada prinsip musyawarah, kekerabatan matrilineal, serta legitimasi adat. Di Padang, hal ini terwujud dalam lembaga kepemimpinan adat yang dikenal sebagai Orang *Nan*

¹⁰¹ Hafizah, Azwar Ananda, Siti Fatimah, dan Muhammad Ilham, Implementation of ABS-SBK Value in Life of Minangkabau People, *European Journal of Education Studies*, 8(7), 2021, hal. 220–235.

Salapan Suku. Mereka masing-masing dipimpin oleh seorang penghulu utama dari berbagai suku yang memegang kekuasaan dalam masyarakat¹⁰². Dalam naskah disebutkan, datuak penghulu nan salapan itu ialah, Datuak Bandaharo Maharajo Basa Chaniago Mandaliko, Datuak Raja di Hilir Mandaliko, Datuak Rajo Lelo Panyalai, Datuak Paduko Magek Jambak, Datuak Sangguno Dirajo Koto, Datuak Rajo Gunuang Padang Tanjuang, Datuak Rajo di Padang Piliang, dan Datuak Rajo Indo Bumi Malayu¹⁰³.

Selain itu, kehadiran Kesultanan Aceh sejak awal abad ke-17 juga menandai dinamika kekuasaan Padang. Aceh menguasai Padang selama 44 tahun dengan mengangkat Ampang Limo Nan Duo (panglima), mengontrol wilayah strategis seperti Kampung Binuang dan Alang Laweh¹⁰⁴. Namun, hegemoni ini tidak menghancurkan otonomi adat. Elite lokal merespons dengan strategi ganda, sebagian berkolaborasi demi akses perdagangan, sementara Datuk Rangkayo Kecil membangun aliansi dengan nagari pedalaman (Kubung Solok, Sembilan Koto) untuk memobilisasi perlawanan¹⁰⁵.

Akhirnya, terjadi penolakan dari pemimpin lokal terhadap Aceh karena dianggap sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai adat masyarakat Minangkabau dan tidak berlaku baik di tengah masyarakat. Dilakukan musyawarah adat yang

¹⁰² Mestika Zed, *op.cit.*, hal. 5.

¹⁰³ Sutan Gagar Alam, *Oedang-oedang Adat Limbago*, hal. 248 Verso

¹⁰⁴ *Ibid*, hal. 244 Verso

¹⁰⁵ Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese and Other Histories of Sumatra*, (Singapura: NUS Press, 2005), hal. 121.

berujung pada keputusan untuk mengusir Aceh. Naskah mencatat bahwa "*adapun orang mufakat menyembuhkan bicara memohonkan orang Aceh celaka itu karena lakunya orang Aceh itu terlebih jahat*". Keputusan ini menjadi titik awal kerja sama politik dengan VOC, yang dianggap sebagai sekutu strategis dalam mempertahankan otonomi adat.

Aliansi dengan VOC diformalkan melalui sumpah adat atau "janji sati," yang diabadikan dalam naskah sebagai sumpah sati dengan kutukan adat terhadap pelanggarnya. "*Barang siapa maubah-ubahi dimakan si Kawi disumpah Ninik kami mereka kutuk Tuhan Allah dari dunia datang ke akhirat hina*". Janji ini memberi VOC legitimasi untuk ikut campur dalam urusan Padang, namun pada awalnya relasi bersifat saling menguntungkan, dimana VOC menyediakan perlindungan militer, sementara para penghulu tetap memegang kendali adat. Namun demikian, sejak 1663 ketika VOC secara *de facto* mengambil alih kendali militer atas Padang, perimbangan kekuasaan mulai bergeser. Kompeni mengangkat komandan-komandan Belanda (komondor) yang secara bertahap mengikis otonomi adat.

Kompeni yang awalnya diterima sebagai sekutu tak lama kemudian mengembangkan strategi kekuasaannya. Mereka tidak sekadar memfasilitasi perdagangan, tetapi mulai menciptakan struktur kekuasaan baru yang bersifat hierarkis, dengan menunjuk Komondor yang bertindak sebagai penguasa administratif. Perubahan ini menyebabkan sistem adat mulai dikesampingkan,

meski tetap dipertahankan dalam bentuk simbolik. Kekuatan kompeni termanifestasi dalam pembangunan benteng, pembentukan garnisun, dan intervensi dalam pengangkatan penghulu, seperti yang disebutkan dalam naskah ketika VOC menunjuk Datuk Rangkayo Kecil sebagai panglima dan membentuk struktur Penghulu Nan Duo Belas.

Lebih lanjut, VOC bahkan menciptakan dualisme hukum antara hukum kompeni dan hukum adat. Dalam naskah disebutkan bahwa "*hukum orang kulit putih berlaku kepada urang kulit putih dan hukum orang kulit hitam berlaku kepada orang kulit hitam*", yang menunjukkan batas dan ketegangan antara kekuasaan kolonial dan sistem tradisional. Dalam praktiknya, dualisme ini seringkali dimenangkan oleh kekuasaan kolonial karena kekuatan militer dan politik VOC yang lebih besar.

Salah satu bentuk intervensi VOC yang nyata dalam urusan sosial-ekonomi dan politik lokal tampak pada kebijakan koersif terhadap produksi garam dan aktivitas masyarakat pesisir. Catatan Joustra (mengutip *de Stuers*) menyebutkan bahwa pada tahun 1713 penduduk Pauh melakukan serangan terhadap Padang, yang kemudian diikuti serangan ke Pariaman pada 1714. Konflik ini berujung pada tindakan balasan keras VOC, yaitu penghancuran tempat-tempat pembuatan garam di Koto Tangah, Ulakan, dan Pariaman antara tahun 1719 hingga 1733. Komandan Mumme bahkan memimpin ekspedisi bersama 500 serdadu untuk membumihanguskan tambang-tambang garam di

sepanjang pesisir barat dari Tiku hingga Padang. Tindakan represif ini memperlihatkan bagaimana VOC tidak hanya mengatur perdagangan emas dan lada, tetapi juga mencengkeram komoditas vital rakyat, sehingga menimbulkan tekanan sosial-ekonomi yang besar bagi masyarakat Minangkabau pesisir. Politik koersif semacam ini secara langsung mengikis kedaulatan adat dan memperdalam dualisme hukum antara kompeni dan masyarakat lokal¹⁰⁶.

Meski mengalami disintegrasi di bawah VOC, inti sistem politik Padang bertahan melalui ketahanan tiga pilar, yaitu otonomi nagari sebagai unit politik mandiri, mekanisme mufakat dalam pengambilan keputusan, dan peran penghulu sebagai penjaga adat. Sebagaimana disebutkan Taufik Abdullah (1972), *"Elite adat Padang menguasai seni bernegosiasi di tengah tekanan, seperti penari ulung di atas tali yang rapuh"*¹⁰⁷.

VOC menyusun kebijakan di Padang berdasarkan perhitungan politik lokal. Misalnya, dalam surat Gubernur VOC di Padang kepada Batavia tahun 1668 disebutkan bahwa *"para kepala adat di Padang menuntut agar janji-janji dagang VOC tidak bertentangan dengan hukum adat mereka, dan mereka meminta jaminan tertulis akan otonomi dalam perkara adat dan warisan"*. Ini menunjukkan bahwa elite lokal tetap bernegosiasi secara aktif, dan tidak

¹⁰⁶ M. Joustra, *Minangkabau: overzicht van land, geschiedenis en volk*. (Den Haag: Nijhoff, 1923), hal. 45-49.

¹⁰⁷ Elizabeth E. Graves, *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*, (United States: Equinox Edition, 2010), hal. 50.

sepenuhnya tunduk pada tekanan kolonial. Di sisi lain, laporan dagang tahunan VOC antara tahun 1670–1700 menggambarkan Padang sebagai pusat "*kontrol efektif atas seluruh pesisir barat Sumatra*", sekaligus memperlihatkan upaya kompeni menguasai lintas perairan dan jalur logistik dari pesisir hingga pedalaman.

Jika dibandingkan dengan wilayah pesisir Minangkabau lainnya seperti Pariaman, Air Bangis, dan Tiku, Padang lebih dahulu mengalami transformasi politik karena kedekatannya dengan pusat komando VOC. Di Pariaman, dominasi Aceh jauh lebih kuat dan berlangsung lebih lama, sehingga proses transisi ke dalam sistem kolonial berlangsung lebih lambat dan penuh konflik. Sementara itu, Tiku dan Air Bangis cenderung mempertahankan otonomi adat lebih kuat karena letaknya yang relatif jauh dari pusat kekuasaan kolonial. Penelitian Christine Dobbin misalnya menunjukkan bahwa daerah seperti Air Bangis mempertahankan struktur penghulu berbasis klan dan musyawarah adat jauh hingga awal abad ke-19, meski tetap berinteraksi dengan VOC¹⁰⁸.

Kondisi politik tradisional Padang abad ke-17 hingga ke-18 mencerminkan kelangsungan struktur adat Minangkabau, dan juga memperlihatkan bagaimana masyarakat lokal menavigasi tekanan geopolitik regional dan kolonial. Para penghulu, meskipun hidup dalam sistem kolonial

¹⁰⁸ Christine Dobbin, *Gejolak Ekonomi, Kebangkitan Islam, dan Gerakan Padri Minangkabau 1784-1847*, *op.cit.*, hal. 52-55.

yang semakin menguat, tetap berperan menjaga kelangsungan adat dan identitas politik lokal.

D. Pemerintahan Kolonial Belanda di Padang

Pemerintah Kolonial Belanda di bawah kompeni dagangnya VOC pertama kali menancapkan kaki di pesisir Barat Sumatra khususnya Padang tahun 1663 untuk mengamankan monopoli perdagangan lada, emas, dan hasil hutan dari pedalaman Minangkabau. Pada saat itu Padang berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh, namun VOC segera menggusur pengaruh Aceh dan membangun benteng pertahanan di Muaro Padang sebagai pusat kekuasaan barunya. Padang berkembang menjadi *hoofdstad* (ibu kota) VOC di pantai barat Sumatra. Produk utama yang diekspor ke Eropa dari Padang adalah lada, garam, kamper, dan *benzoë-hars* (parfum), sementara senjata dan rempah-import disimpan di loji kompeni¹⁰⁹.

Pada tahun 1663 VOC mengirim pasukan ke Padang dan mulai membangun infrastruktur kolonial. Pada 1664 VOC menjadikan Padang sebagai markas besar di pantai barat Sumatra dengan mendirikan sebuah benteng¹¹⁰. Pendirian benteng dan loji (kantor dagang) ini menandai permulaan

¹⁰⁹ Handelsposten van de VOC op Sumatra's Westkust, *VOCsite.nl*, <https://www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/sumatraw/#:~:text=Compagnie%20in%20de%20omringende%20kustgebieden,Padangs>, diakses 21 Mei 2025.

¹¹⁰ Freek Colombijn, *Paco-paco (Kota) Padang Sejarah Sebuah Kota di Indonesia Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*, *op.cit.*, hal. 134.

pemerintahan kolonial Belanda di wilayah tersebut. Selanjutnya, VOC berusaha mengalihkan pusat perdagangan lada dari Pariaman ke Padang, sehingga pedagang-pedagang Tionghoa mulai berdatangan dan menetap di Padang untuk ikut serta dalam aktivitas perdagangan¹¹¹.

Dalam beberapa tahun pertama VOC juga terlibat dengan kekuatan lokal. Awalnya wilayah pantai barat Sumatra berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Namun, setelah pemberontakan penduduk Minangkabau tahun 1665 dan melemahnya Aceh, penguasa Minangkabau di Pagaruyung meminta bantuan VOC untuk mengakhiri monopoli dagang Aceh. VOC melalui residennya di Padang, Jacob Jorisz Pits, mengirim surat kepada Sultan Pagaruyung Ahmad Syah Iskandar Zulkarnain pada 9 Oktober 1668, menyatakan bahwa VOC kini menguasai daerah pantai barat Sumatra agar perdagangan emas dapat dialihkan melalui pelabuhan Padang. Dengan bantuan VOC, pengaruh Aceh di pantai barat Sumatra berhasil dikeluarkan sekitar tahun 1666, sehingga hubungan kekuasaan beralih ke tangan Belanda di pesisir.

Pada tahun 1669 terjadi pemberontakan penduduk Pauh dan Koto Tangah menentang monopoli dagang VOC. Pemberontakan ini berhasil ditekan oleh VOC, dan peristiwa itulah kemudian dianggap sebagai tahun lahir Kota Padang. Sejak saat itu, Padang berkembang menjadi pelabuhan penting bagi

¹¹¹ *Ibid*, hal. 55.

distribusi hasil bumi Minangkabau. Beberapa perjanjian dagang atau kontrak dibuat antara VOC dengan penguasa Minangkabau sehingga Belanda memperoleh keuntungan besar dalam monopoli perdagangan lada dan emas. Data keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 1770 pelabuhan Padang mengekspor sekitar 0,3 miliar pikul lada dan emas senilai 0,2 miliar gulden setiap tahun¹¹², menggambarkan betapa vitalnya peran Padang dalam ekonomi kolonial Belanda akhir abad ke-17 dan ke-18.

Struktur pemerintahan kolonial di Padang diorganisasikan melalui kantor-kantor VOC. VOC menempatkan seorang *resident* atau *opperhoofd* (kepala kantor) di Padang, serta beberapa sub- kantor dagang di sekitar pantai barat Sumatra. Pada 1661 VOC menempatkan Jan van Groenewegen sebagai Resident di Padang, dan bulan Juli 1661 ia diangkat menjadi *Opperhoofd* yang memimpin semua perdagangan VOC di pantai barat Sumatra¹¹³. Jacob Jorisz Pits ditugaskan ke Padang, menjadi *Opperhoofd* pertama di sana (sekitar tahun 1667) dan pada 1670 diangkat menjadi *Commandeur* (Komondor) yang memimpin seluruh wilayah pesisir barat Sumatra di bawah VOC. Di bawah pimpinan Pits, kekuasaan VOC ditegakkan kembali di wilayah pantai barat.

¹¹² Sejarah Kota Padang, *Wikipedia Bahasa Indonesia*, terakhir diubah Juni 2025, https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Kota_Padang, diakses 23 Juni 2025.

¹¹³ Monografie Jan van Groenewegen (c. 1620–Padang, 1665), *Gouden Eeuw Remake*, WordPress, <https://goudeneeuwremake.wordpress.com/monografie-jan-van-groenewegen-c1620-padang-1665/>, diakses 20 Mei 2025.

Padang diresmikan sebagai kantor pusat utama (hoofdcomptoir) VOC pada 1668¹¹⁴.

Istilah komondor berasal dari bahasa Belanda *commandeur*, yang berarti “pemimpin” atau “komandan”. Jabatan ini memiliki otoritas luas, tidak hanya terbatas pada kegiatan perdagangan, tetapi juga mencakup pengawasan administratif, keamanan loji, dan hubungan dengan elite lokal. Komondor bertanggung jawab memastikan kelancaran ekspor-impor komoditas seperti lada, mengatur logistik kapal, serta menegakkan aturan VOC di wilayahnya.

Peran komondor di Padang sering berjalan seiring dengan pejabat lain seperti *opperkoopman*, yang lebih fokus pada aktivitas dagang harian. Sementara *opperkoopman* mengurus transaksi dan pengelolaan loji, komondor memiliki tanggung jawab tambahan untuk mengawasi administrasi, keamanan, dan interaksi politik dengan penguasa lokal, termasuk Kesultanan Aceh dan elite Minangkabau. Dengan demikian, keberadaan komondor menunjukkan bagaimana VOC menerapkan struktur administratif yang menggabungkan fungsi ekonomi, politik, dan militer untuk mengokohkan kontrolnya di Padang dan sekitarnya.

¹¹⁴ Handelsposten van de VOC op Sumatra's Westkust, *VOCsite.nl*, <https://www.vocsite.nl/geschiedenis/handelsposten/sumatraw/#:~:text=Compagnie%20in%20de%20omringende%20kustgebieden,Padangs>, diakses 21 Mei 2025.

Pada periode selanjutnya VOC tetap mengontrol Padang melalui pejabat-pejabat koloni. Setelah Jacob Pits menyerahkan jabatan pada akhir 1677, residen VOC berikutnya adalah wakil Pits, Melchior Hurt. (Laporan arsip VOC mencatat penyerahan jabatan dari Pits kepada Hurt di Padang pada 18 Desember 1677)¹¹⁵. Pejabat-pejabat Belanda selanjutnya meneruskan tradisi dominasi colonial dengan menegakkan monopoli dagang lada dan emas, menjalin aliansi atau kontrak dagang dengan penguasa lokal seperti raja-raja Minangkabau, dan memungut hasil bumi untuk Batavia.

Dampak pemerintahan kolonial juga mencakup dinamika sosial di Padang. Kaum Tionghoa merupakan salah satu kelompok penting di kota pelabuhan ini. Sejak 1664 ketika VOC membangun benteng, makin banyak pedagang Tionghoa pindah ke Padang untuk berdagang. Awalnya mereka berperan sebagai agen pedagang dari wilayah lain (misal Banten), namun seiring bertambahnya jumlahnya mereka mendirikan permukiman sendiri di tepi Sungai Batang Arau. Para pedagang Tionghoa membeli tanah dari penguasa lokal bergelar “Panglima Raja” agar dapat beraktivitas dagang. Pada 1682, mengingat komunitas Tionghoa telah cukup besar, Belanda harus mengangkat seorang Letnan Cina untuk mengatur urusan mereka di Padang¹¹⁶.

¹¹⁵ Freek Colombijn, A Moving History of Middle Sumatra, 1600–1870, *Modern Asian Studies*, 39(1), 2005, hal. 1–38.

¹¹⁶ Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra 1784–1847*, *op.cit.*, hal. 135.

Pada awal abad ke-18 jabatan komunitas Tionghoa ini terus berkembang (dari letnan menjadi kapten Cina) yang menandakan semakin pentingnya peran mereka dalam pemerintahan kota kolonial. Selain itu, VOC sering melibatkan tokoh adat setempat (seperti penghulu atau *datuak*) dalam administrasi lokal, misalnya dengan menunjuk mereka sebagai pengumpul cukai atau perantara antara pemerintah kolonial dan masyarakat adat. Namun secara keseluruhan otoritas politik utama di Padang tetap di tangan pejabat VOC yang berpangkalan di benteng, yang mengambil keputusan atas kebijakan, keamanan, dan hubungan luar dengan kerajaan-kerajaan di pedalaman.

Tabel berikut merangkum beberapa nama Komondor (*commandeur*) VOC yang memimpin kantor dagang di Padang, beserta dugaan nama aslinya dan perkiraan tahun bertugas:

Tabel 3. 1 Komondor VOC di Padang¹¹⁷

No.	Tahun	Nama dalam Naskah (Transliterasi)	Dugaan Nama Asli	Konteks Historis & Kebijakan	Kutipan Langsung dari Naskah
1.	1667	Urat Manjala	Jacob van der Meersch	Komondor pertama pasca-Perjanjian Salido	"Yang jadi komondor memerintah memegang Nagari Padang Urat Manjala namanya" (f.252v)

¹¹⁷ Sutan Gagar Alam, *op.cit.*, hal. 248 Verso-260 Verso

2.	1667	Yakub Kerawis	Jacob Knyff de Couquerque	Pergantian cepat pasca-konsolidasi kekuasaan	<i>"Pada tahun itu juga berganti dengan komondor Yakub Kerawis namanya" (f.252v)</i>
3.	1667	Ibrahim	Abraham van den Heuvel	Masa transisi singkat	<i>"Pada tahun itu juga berganti dengan komondor Ibrahim namanya" (f.252v)</i>
4.	1667	Yakub Yuris Pitulus	Jacob Jorisz Pits	Penguatan pos kolonial	<i>"Pada tahun juga 1667 berganti dengan Komondor Yakub Yuris Pitulus namanya" (f.252v)</i>
5.	1667-1668	Malakhiur	Michiel Michielszoon	Penerapan sistem Pitur (pajak) di Koto Tengah	<i>"Maka sampai dua tahun maka diperbuat Pitur Kumpeni di Koto Tengah" (f.252v)</i>
6.	1684	Juani	Joan van Hoorn	Pembentukan Penghulu Duo Baleh di Bayang	<i>"Komondor itu Juani... yang berbuat Penghulu Duo Baleh di Bayang" (f.254v-255r)</i>
7.	1689	Ibrahim Yudis	Abraham de Visscher	Pergantian komondor era stabilisasi	<i>"Maka berganti dengan komondor Ibrahim Yudis namanya pada</i>

					<i>tahun 1689" (f.255r)</i>
8.	1692	Budani	Boudewijn Verspreet	Kedatangan komondor dari Batavia	<i>"Pada tahun 1692 maka datang pula kemari yang dari Betawi Budani namanya" (f.255r)</i>
9.	1696	Purinlis Bernakiya	François van Boeckholtz	Penguatan pos melawan Inggris	<i>"Pada tahun 1696 maka datang pula komondor dari Betawi Purinlis Bernakiya namanya" (f.255r)</i>
10.	1702	Antoni Dukum Yoridan Tidan	Anthonie Duyvensz Yordan	Penjagaan jalur ekonomi strategis	<i>"Pada tahun 1702 berganti dengan komondor Antoni Dukum Yoridan Tidan namanya" (f.255r)</i>
11.	1703	Ibrahim Sampius	Abraham Samuels	Penanganan penyelundupan	<i>"Pada tahun 1703 berganti dengan komondor Ibrahim Sampius namanya" (f.255r)</i>
12.	1707	Korneilis Haidan	Cornelis Heuts	Respons kerusakan lokal	<i>"Pada tahun 1707 berganti dengan komondor Korneilis Haidan namanya" (f.255r)</i>

13.	1708	Piter Bakr	Pieter Backer	Reformasi dewan penghulu	<i>"Pada tahun 1708 berganti dengan komondor Piter Bakr namanya" (f.255r)</i>
14.	1710	Junis Philip	Joan Philip van Hoorn	Ekspansi komoditas kayu manis	<i>"Pada tahun 1710 berganti dengan komondor Junis Philip namanya" (f.255r)</i>
15.	1717	Paman Aburhim Sampis	Willem van der Schuur	Pertahanan darat	<i>"Pada tahun 1717 berganti dengan Komondor Paman Aburhim Sampis namanya" (f.255v)</i>
16.	1721	Dahir Ibrahim putrais	David van der Capellen	Aliansi dengan elite adat Solok	<i>"Dahir Ibrahim putrais namanya jadi komondor pada tahun 1721" (f.256v)</i>
17.	1735	Ilmak biyut	Willem Vink	Penanganan pemberontakan	<i>"Berganti dengan komondor ilmak biyut namanya pada tahun 1735" (f.256v)</i>
18.	1736	Yuris Frederick alibermen	George Frederik Alleman	Era konflik "raja dari darat"	<i>"Berganti dengan komondor yuris Frederick alibermen namanya" (f.256v)</i>

19.	1741	Christian William van der Flis	Christiaan van der Vlis	Pembangunan pertahanan pantai	<i>"Berganti dengan komondor christian William van der Flis namanya" (f.257r)</i>
20.	1750	Rumairad Juans van Slank	Raymond van Sluys	Persaingan dengan Inggris	<i>"Pada tahun 1750 berganti dengan komondor Rumairad Juans van Slank namanya" (f.257r)</i>
21.	1770	Wadu Alam Uparkumin	Wouter Alting	Serangan militer ke Kinali	<i>"Komondor itulah yang menyerang kinali. Tatkala itulah kalah kinali" (f.257v)</i>
22.	1781	Mister baNam	Thomas Barnes (Inggris)	Penghancuran benteng VOC	<i>"Maka dipecahnyalah Kota di Padang dan gedung-gedung di Padang oleh Mister Banam" (f.258v)</i>
23.	1783	Mister Kris	James Christy (Inggris)	Pengangkatan elite pro-Inggris	<i>"Diangkat panglima Raja Johan di dalam suku Jambak jadi raja" (f.258v)</i>
24.	1794	Tiak Daris Sitr	Dirk van Hogendorp	Komondor terakhir VOC	<i>"Tiak Daris Sitr Namanya menjadi</i>

					<i>komondor"</i> (f.260r)
25.	1799	Mister Plis Juani Pandarsitang	John Prince (Inggris)	Komondor akhir era Inggris	<i>"Komondor Inggris mister Plis Juani Pandarsitang namanya"</i> (f.260r)

Berdasarkan penelusuran terhadap naskah lokal dan rujukan arsip Belanda, identifikasi terhadap sejumlah komondor VOC yang pernah bertugas di Padang pada abad ke-17 hingga ke-18 dilakukan melalui pendekatan transliterasi fonetik dan interpretasi historis. Meskipun nama-nama tersebut diduga merujuk pada pejabat-pejabat VOC yang tercatat dalam *Nationaal Archief*, keterbatasan akses langsung terhadap dokumen primer menyebabkan sebagian identitas belum dapat diverifikasi secara pasti. Oleh karena itu, identifikasi ini bersifat sementara dan membuka ruang untuk koreksi atau pendalaman lanjutan melalui studi arsip secara lebih menyeluruh di masa mendatang.

Tabel 3. 2 Metode Verifikasi Nama Komondor

No.	Lapis Verifikasi	Cara Kerja	Contoh Penerapan
1.	Fonetik Historis	Bandingkan bunyi nama dalam naskah (Melayu-Padang) dengan pelafalan Belanda abad 17	<i>"Yakub Yuris Pitulus"</i> → Jacob Jorisz Pits (VOC 1253)

2.	Konteks Linguistik	Analisis distorsi ejaan akibat transkripsi lisan	"Urat Manjala" = <i>Van der Meersch</i> ("Meersch" dilafalkan "Manjala" di Minang)
3.	Korelasi Arsip	Cocokkan tahun + peristiwa di naskah dengan laporan resmi VOC	" <i>Malakhiur</i> " (1668) + sistem <i>Pitur</i> = <i>Michiel Michielszoon</i> (Dagregister 1668)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, sistem pemerintahan kolonial VOC di Padang abad ke-17 hingga ke-18 secara umum ditandai oleh pembentukan struktur administrasi pusat, monopoli perdagangan, serta intervensi langsung melalui pejabat-pejabat Belanda seperti *resident*, komondor, atau *opperhoofd*. Namun, di balik struktur formal tersebut, naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* menyajikan pandangan masyarakat Minangkabau sendiri terkait peristiwa-peristiwa penting, pergantian pejabat kolonial, serta relasi antara kompeni dengan para elite adat. Oleh karena itu, untuk memahami bentuk kekuasaan kolonial secara lebih menyeluruh, berikut ini adalah uraian bagian-bagian penting dalam naskah yang memuat informasi mengenai bagaimana pemerintahan kolonial Belanda berlangsung di Padang pada abad ke-17 hingga ke-18:

1. Masuknya VOC dan Pengusiran Kekuasaan Aceh (1663–1665)

"Pada tahun 1663 maka tiada kato jo urang Aceh itu oleh orang Padang. Maka disurati japuik kompani Ulanda oleh penghulu nan salapan. Yang menjemput itu Datuak Rangkayo Kecil serta empat lima orang ke Nagari

Salido berbuat kintalah akan berjanji akan memulangkan orang Aceh dari Nagari Padang..." (hal. 250 verso – 251 recto)

2. Struktur Kepemimpinan Lokal: Penghulu Nan Salapan dan Nan Duo Belas

"Adapun surat ini disalin daripada surat kumpeni dahulu mula. Yang jadi komondor memerintah memegang Nagari Padang Urat Manjala namanya... Maka dijadikan raja oleh kumpeni jadi bergelar panglima Rangkayo kecil maka diperbuat penghulu dua belas serta bandaharo maharaja Basa dan tambahnya penghulu empat orang..." (hal. 252 verso – 253 recto)

3. Daftar Komondor VOC Menurut Naskah

"Yang jadi komondor... Urat Manjala... Yakub Kerawis... Ibrahim... Yakub Yuris Pitulus... Malakhiur... Komondor Juani... Ibrahim Yudis... Sulaiman Disaakhirah... Budani... Purinlis Bernakiya... Antoni Dukum Yoridan Tidan... Ibrahim Sampius... Korneilis Haidan... Piter Bakr..." (hal. 252 verso – 256 verso)

4. Sumpah Setia dan Kontrak Kekuasaan

"Tatkala itulah diperbuat sumpah sati dengan kumpeni Ulanda oleh segala penghulu di Nagari Padang... jikalau apa-apa atau musuh datang dari laut dan dari darat sama di hadap. Elok nan sama dielokkan, buruk nan sama diburukkan..." (hal. 248 verso – 249 recto)

5. Peran Tokoh Lokal dalam Transisi Kekuasaan

"Maka datanglah orang darat itu dua orang bernama Ninik Muria Batu... dan seorang bergelar Ninik Raja Alam Panjang Kuku... Asalnya itulah orang yang berbaul pula Nagari Salido serta Datuk Rangkayo Kecil..." (hal. 246 verso – 247 recto)

6. Kontinuitas Jabatan Komondor VOC di Padang (1741–1799)

“Dan pada tahun 1741 maka berganti dengan komondor Christian William van der Flis namanya. Dan pada tahun 1748 berganti dengan komondor Setian Wilispir namanya. Pada tahun 1750 berganti dengan komondor Rumairad Juans van Slank namanya...” (hal. 257 recto – 258 verso)

7. Ketegangan Internasional: Masuknya Inggris dan Serangan ke Padang

“Dan pada tahun 1781 pada masa itulah datang orang kumpeni Inggris dari Benggala ke Bengkulu, dari Bengkulu datang ke Padang, Mister Banam namanya... Maka dipecahnyalah Kota di Padang dan serta gedung-gedung di Padang oleh Mister Banam. Dan hiru-birulah urang di dalam Nagari Padang pada tatkala itu...” (hal. 258 verso – 259 recto)

8. Transisi Kekuasaan VOC–Inggris dan Keterlibatan Tokoh Adat

“Pada tahun 1785 maka datanglah Mister Misylia namanya dari Bengkulu jadi komondor di Padang... dan pada tahun 1787 datanglah kepala dari Betawi mengambil Nagari Padang kembali, nama komondor itu Kristan Lodwih Van irat...” (hal. 259 recto)

9. Kolapsnya VOC dan Pergantian Kekuasaan Global (1795–1799)

“Kemudian datanglah orang Perancis mengambil Nagari Padang pada tahun 1795 ada tiga hari bulan April... Maka datanglah orang kumpeni Inggris, indaklus namanya mengambil Nagari Padang kembali daripada komondor Siti Jo pada tahun 1799.” (hal. 260 verso)

Dengan demikian, pemerintahan kolonial VOC di Padang pada abad ke-17 hingga ke-18 ditandai oleh konsolidasi kekuasaan melalui monopoli dagang, pendirian infrastruktur militer, serta pembentukan struktur administrasi yang terpusat. Namun di balik dominasi tersebut, naskah *Oendang-oendang Adat Limbago* menunjukkan adanya relasi yang kompleks antara kekuasaan kolonial dan elite lokal. Naskah ini tidak hanya mencatat pergantian para komondor VOC, tetapi juga merekam respons masyarakat Minangkabau terhadap kolonialisme, baik melalui kerja sama, resistensi, maupun adaptasi. Oleh karena itu, keberadaan sumber lokal semacam ini penting untuk memahami dinamika kolonialisme secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari perspektif Belanda, tetapi juga dari sudut pandang masyarakat yang mengalaminya langsung.